

**ANALISIS DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR WILAYAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2015-2019****Anggaharianto Ambar¹, Een N. Walewangko², Steeva Y.L Tumangkeng³**

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : 17061101053@student.unsrat.ac.id**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini menganalisis disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah Kabupaten/Kota dan Struktur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019 serta Hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder pada tahun 2015-2019. Alat analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Pearson Korelasi. Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis adalah Microsoft Excel 2010 dan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka Indeks Williamson di Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir adalah kategori ketimpangan taraf rendah. Sedangkan untuk pengklasifikasian daerah berdasarkan wilayah menggunakan Tipologi Klassen dengan pendekatan daerah terbagi atas: Daerah maju dan tumbuh cepat, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah; Daerah maju tapi tertekan, yakni Kabupaten Halmahera Timur; Daerah cepat berkembang tapi tidak maju yakni, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Taliabu; Daerah relatif tertinggal yakni, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kota Tidore. Adapun hubungan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sebesar $-0,379$ tanda negatif menunjukkan hubungan yang negatif sedangkan untuk nilai signifikansinya adalah $0,529 > 0,5$ yang artinya hubungan antara pertumbuhan dan Indeks ketimpangan tidak signifikan.

Kata Kunci: *Disparitas, Indeks Williamson, Tipologi Klassen, Korelasi Pearson*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten dan kota merupakan sebuah fenomena yang krusial dalam pembangunan daerah. Dengan adanya disparitas antar wilayah menunjukkan bahwa terjadi perbedaan tingkat kesejahteraan. Hal itu menggambarkan bahwa ada beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan karakteristik daerah masing-masing, seperti perbedaan kondisi demografi, perbedaan sumber daya alam, terpusatnya kegiatan ekonomi disuatu wilayah (aglomerasi), serta kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa di daerah tersebut.

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 di Provinsi Maluku utara terdapat Pembangunan kawasan industri Prioritas/ Kawasan Ekonomi Khusus yaitu : Pembangunan Kawasan Industri Buli, dikabupaten Halmhera Timur dan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dikabupaten Kepulauan Morotai serta Proyek Pembangunan Smelter di Buli. Hingga pada Tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No.109 Tahun 2020 tercatat tambahan agenda proyek pembangunan nasional (PSN) di Maluku Utara yaitu : Pembangunan Kawasan Industri Pulau Obi dan Kawasan Industri Weda Bay.

Masalah pembangunan yang di Provinsi Maluku Utara terbilang cukup bervariasi, mulai dari ketimpangan infrastruktur fisik yang tersebar di berbagai kabupaten. Ambil contoh di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan pengamatan penulis di beberapa kecamatan di kabupaten tersebut, sebut saja dikecamatan Ibu dan Loloda yang hingga saat ini saat tulisan ini ditulis daerah tersebut masih tertinggal dari Infrastruktur fisik seperti jalan raya sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat belum cukup memadai, dan Infrastruktur jaringan telekomunikasi jaringan masih belum memadai di Kecamatan Ibu. Pemerintah daerah Kabupaten masih terfokus membangun infrastuktur hanya di wilayah pusat Ibukota Kabupaten. Masalah selanjutnya juga bisa dilihat di kabupaten Halmahera Utara, dengan potensi sektor pertambangan emas diwilayah tersebut, seharusnya penyerapan tenaga kerja lokal terserap besar-besaran, namun sayangnya penyerapan tenaga kerja banyak mererap tenaga kerja dari pulau jawa dan lain-lain, fakta tersebut memberi gambaran bahwa belum tentu dengan aktivitas pertambangan yang ada di daerah tersebut memberi dampak kesejahteraan masyarakat. Dengan fakta tesebut dapat dibagun asumsi bahwa masyarakat setempat belum tentu mengalami kenaikan pendapatan.

Masalah terpusatnya Aglomerasi di Kota Ternate juga menjadi pemicu adanya ketimpangan pembangunan ekonomi, alasannya adalah karena yang mempunyai kosentrasi ekonomi cukup tinggi akan cenderung bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kosentrasi lebih rendah. Kabupaten Halmahera Tengah dengan potensi Pertambangan Nikel pada kenyataan menunjukkan bahwa terjadi penyerapan tenaga kerja yang terserap dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara, sudah tentu terjadi aktivitas migrasi penduduk besar-besaran akibat dari kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat bahwa setiap pelamar di PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP). Aktivitas pertambangan di kabupaten ini memberi dampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan PAD didaerah tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut juga mengalami peningkatan.

Tabel 1

PDRB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga

Wilayah	Konstan (Milyar Rupiah)				
	PDRB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Halmahera Barat	1 246,3	1 310,1	1 375,7	1 447,5	1 531,6
Halmahera Tengah	1 134,4	1 262,0	1 335,2	1 428,5	1 522,8
Kepulauan Sula	1 327,8	1 395,6	1 463,0	1 545,4	1 643,3
Halmahera Selatan	3 064,2	3 238,6	3 758,6	4 338,8	4 860,2
Halmahera Utara	3 220,5	3 350,2	3 571,9	3 659,2	3 770,5
Halmahera Timur	1 784,9	1 883,2	2 018,2	2 179,8	2 301,8
Pulau Morotai	821,3	872,9	927,2	989,2	1 034,5
Pulau Taliabu	726,5	767,9	808,6	906,1	991,7
Ternate	5 357,3	5 785,4	6 222,3	6 735,0	7 290,4
Tidore Kepulauan	1 603,3	1 687,1	1 788,4	1 896,8	2 018,9
Maluku Utara	20 380,3	21 556,7	23 210,9	25 050,1	26 586,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Maluku Utara 2015-2019, data diolah

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1, dapat dilihat bahwa angka PDRB terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan mulai dari tahun 2015 hingga 2019 di masing-masing kabupaten dan kota. Dengan kota Ternate sebagai penyumbang PDRB terbesar setiap tahunnya dan Kabupaten Pulau Morotai dan Pulau Taliabu masih berada pada sebagai kabupaten penyumbang PDRB pada angka terkecil. Data tersebut menggambarkan bahwasannya terdapat potensi perbedaan antara daerah tersebut, hal tersebut menjadi motivasi utama penulis untuk melakukan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengeloah setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam menciptakan sebuah lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. (Arsyad, 2016).

Pembangunan atau perkembangan ekonomi menunjukkan perubahan-perubahan dalam struktur output dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian disamping kenaikan output. Jadi pada umumnya pembangunan ekonomi selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan atau perkembangan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi akan memberikan manfaat utama yaitu terjadinya pertambahan output dan kekayaan suatu masyarakat atau suatu perekonomian sehingga hal tersebut akan memberikan kemampuan yang lebih besar bagi manusia untuk menguasai dan mengolah sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasan dalam mengadakan suatu tindakan tertentu (Irawan, 1992)

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Rahardjo, 2013). Istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan sesuatu ekonomi. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti berkembang fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi

sektor jasa dan penambahan produksi barang modal (Sukirno, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus menerus dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun (Tambunan, 2001).

Pertumbuhan ekonomi merupakan target yang ingin dicapai oleh perekonomian dalam jangka waktu panjang, dan semaksimal mungkin konsisten dengan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi dapat menerangkan dan sekaligus dapat mengukur prestasi perkembangan suatu perekonomian. Dalam aktivitas ekonomi secara actual, pertumbuhan ekonomi (economic growth) berarti terjadinya perkembangan ekonomi secara fiscal yang terjadi di suatu negara seperti: (1) penambahan jumlah dan produksi barang industry; (2) perkembangan infrastruktur; dan (3) penambahan produksi hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam satu periode tertentu, misalnya satu tahun (Dumairy, 2000). Sedangkan menurut Kuznets (1973) pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen : Pertama, pertumbuhan suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus pada persediaan barang; Kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; Ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dibidang kelembagaan dan ideologi sehingga inivasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000)

Teori Ketimpangan Ekonomi Antardaerah

Menurut Sjafrizal (2017) Ketimpangan ekonomi antar daerah pada dasarnya terjadi karena struktur dan pola lokasi dan kosentrasi kegiatan ekonomi antar ruang (*spatial economics*) pada suatu daerah. Struktur dan pola tersebut ditentukan oleh distribusi kegiatan ekonomi antar ruang yang sangat dipengaruhi oleh keuntungan lokasi dari masing-masing tempat yang cenderung menimbulkan kosentrasi kegiatan ekonomi.

Ukuran ketimpangan ekonomi antar wilayah yang mula-mula ditemukan adalah Williamson Index yang digunakan dalam studinya pada pertengahan tahun emampuluan (Williamson, 1965). Secara Ilmu Statistik, indeks ini sebenarnya adalah coefficient of variation yang lazim digunakan untuk mengukur suatu perbedaan. Istilah Williamson Index muncul sebagai penghargaan kepada Jeffrey G. Williamson yang mula-mula menggunakan teknik ini untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Walaupun indeks ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu antara lain sensitif terhadap defenisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, namun demikian indeks ini cukup lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2017).

Menurut Sjafrizal (2018) Kosentrasi kegiatan ekonomi pada lokasi-lokasi tertentu cenderung menjadi semakin meningkat sebagaimana diungkapkan oleh Hirschman (1958) bahwa transmisi pertumbuhan ekonomi antardaerah umumnya tidak berjalan secara seimbang (*unbalanced*). Kondisi ini terutama disebabkan karena variasi yang cukup besar dalam keuntungan lokasi antardaerah yang menyebabkan terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi pada tempat-tempat (*Spacial Concentration*). Kerangka teoritis terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah mula-mula diletakan oleh Borts (1960) yang muncul sebagai analisis lebih lanjut dari teori pertumbuhan ekonomi regional neo-klasik yang dipelopori oleh Sollow (1957). Analisis Bort menjadi sangat terkenal dalam ilmu ekonomi regional karena analisisnya dapat memberikan penjelasan secara teoritis, mengapa terjadi tendensi peningkatan (*divergency*) dan penurunan (*convergency*) dalam ketimpangan ekonomi antardaerah (*regional disparity*). Analisisnya dimulai dengan anggapan bahwa telah terdapat suatu tingkat ketimpangan ekonomi regional dalam suatu perekonomian yang terjadi karena perbedaan dalam kansungan sumber daya alam (*natural resource endowment*).

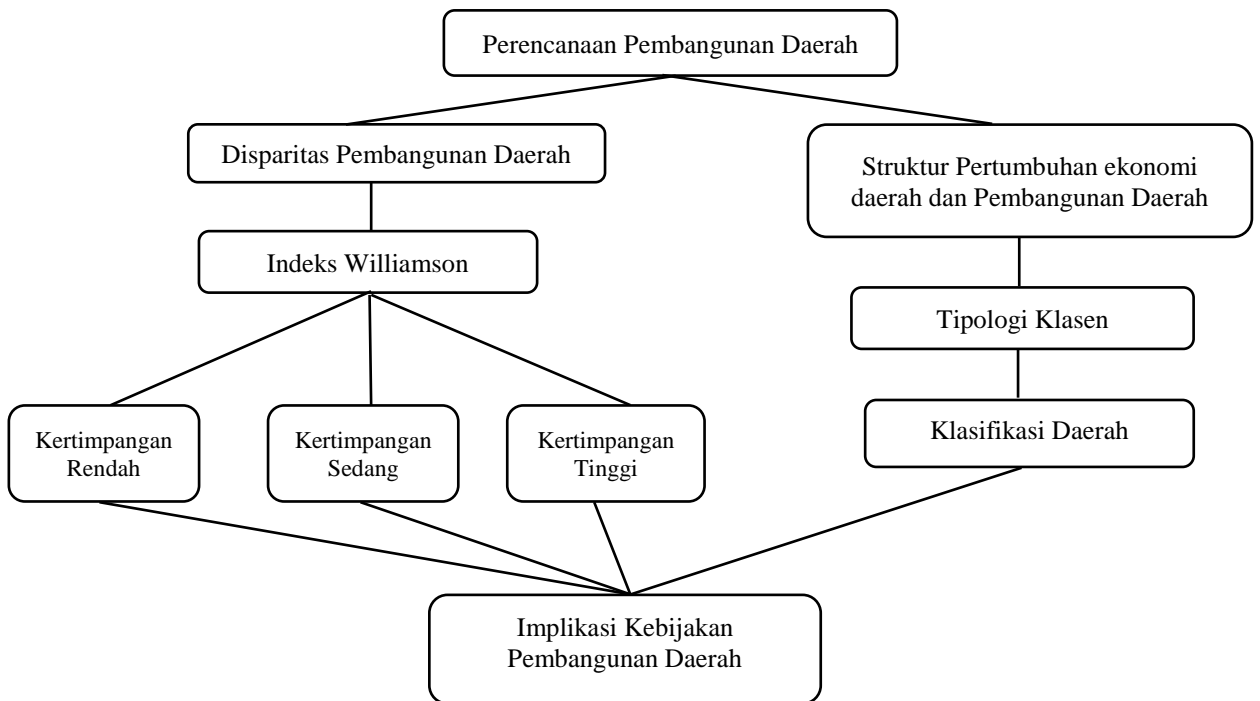
Faktor Penyebab Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah: Perbedaan kandungan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dan alokasi dana pembangunan antar daerah (Sjafrizal, 2017)

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah tersebut ditunjukkan dari laju pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan (Todaro dan Smith, 2008).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Berpikir Ilmiah

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini disajikan dengan bentuk deskriptif kuantitatif. Tempat penelitian ini adalah di provinsi Maluku Utara untuk pengambilan data penelitian. Waktu penelitian adalah tahunan dari tahun 2015-2019.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series tahun 2015-2019. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku literatur, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara.

Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk menyamakan pemahaman tentang variabel-variabel yang digunakan dan menghindari perbedaan penafsiran, maka penulis memberikan batasan defenisi operasional, sebagai berikut :

1. Disparitas pembangunan ekonomi regional adalah ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.
2. Struktur Pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan daerah adalah pengklasifikasian daerah berdasarkan kuadran klasifikasi dengan menggunakan Laju pertumbuhan ekonomi (persen) dan PDRB Perkapita (juta rupiah) di Provinsi Maluku Utara
3. Laju pertumbuhan ekonomi adalah presentase perubahan PDRB tiap kabupaten/kota dan perubahan PDRB Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019 atas dasar harga konstan dalam satuan persen.
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah nilai PDRB kabupaten/kota atau Provinsi Maluku Utara dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota atau Provinsi Maluku Utara per tahun atas dasar harga kosntan dalam satuan juta rupiah
5. Jumlah penduduk adalah jumlah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam satuan jiwa.

Metode Analisis Data

Analisis *Klassen Tipology*

Analisis Tipologi Klassen adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (H.Aswandi dan Mudrajat Kuncoro, 2002). Dari karakteristik dasar yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat PDRB perkapita yang dijelaskan sebelumnya, maka suatu wilayah dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang dimilikinya. Klasifikasi wilayah dalam Tipologi Klassen digambarkan seperti pada Gambar 2. berikut.

PDRB Perkapita (Y)	$y_i > y$	$y_i < y$
Laju Pertumbuhan (R)		
$r_i > r$	Kuadran I Daerah maju dan cepat rumbuh	Kuadran II Daerah maju tapi tertinggal
$r_i < r$	Kuadran III Daerah cepat berkembang	Kuadran IV Daerah relatif tertinggal

Sumber : Sjafrizal, 2017

Gambar 2. Klasifikasi Daerah menurut Analisis Tipologi Klassen

Keterangan :

ri : Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota i
 yi : PDRB perkapita kabupaten/kota i
 r : Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara
 y : Rata-rata PDRB perkapita Provinsi Maluku Utara

Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Alasannya jelas karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah dan bukan tingkat kemakmuran antar kelompok. Indeks Ketimpangan Williamson merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Ketimpangan pembangunan ekonomi dapat dianalisis dengan rumusan sebagai berikut (Sjafrizal, 1997):

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Yi-Y)^2 fi/n}}{Y}$$

Keterangan

Iw = Indeks Williamson

Yi= PDRB per kapita di kabupaten/kota i

Y = PDRB per kapita rata-rata provinsi Maluku utara

fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk provinsi Maluku Utara

Indeks Williamson ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu:

Iw < 0,35 : Ketimpangan taraf rendah

0,35 < Iw < 0,50 : Ketimpangan taraf menengah

Iw > 0,50 : Ketimpangan taraf tinggi

Analisis Pearson Korelasi

Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain (Sekaran, 2010). Metode Pearson Korelasi atau sering disebut *Product Moment Pearson*. Nilai korelasi(r) berkisar antara 1 sampai -1, nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat, sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara kedua variabel semakin lemah.

Rumus Perhitungan Pearson yang dikemukakan oleh Karl Pearson adalah sebagai berikut (Moh. Nazir, 2005)

$$r = \frac{Sp}{\sqrt{SSx-SSy}}$$

Keterangan :

Sp = Sum of Product

SSx = Sumsquare dari variabel X

Ssy = Sumsquare dari Variabel Y

r = koefisien korelasi Spearman

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif menurut Sugiyono (2004) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Analisis Klasen Tipology Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil perhitungan Tipologi Klasen maka diperoleh klasifikasi struktur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2
Klasifikasi Kabupaten/Kota di Maluku Utara Menurut Klasen Tipologi

PDRB Perkapita	$Y_i > y$	$Y_i < y$
Pertumbuhan Ekonomi		
$R_i > r$	Kuadran I - Kota Ternate - Halmahera Tengah	Kuadran II - Halmahera Timur
$R_i < r$	Kuadran III - Halmahera Selatan - Pulau Taliabu	Kuadran IV - Pulau Morotai - Kota Tidore Kepulauan - Kepulauan Sula - Halmahera Utara - Halmahera Barat

Sumber: Data Olah, 2021

Analisis Indeks Williamson Provinsi Maluku Utara

Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran dari rata-rata nilai sebaran hitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk yang berada pada lingkup wilayah kabupaten/kota. Hasil analisis indeks williamson dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3
Indeks Williamson Provinsi Maluku Utara Periode 2015-2019

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2015	0,272274699	Disparitas Taraf Rendah
2016	0,281199721	Disparitas Taraf Rendah
2017	0,276306382	Disparitas Taraf Rendah
2018	0,275404311	Disparitas Taraf Rendah
2019	0,280194557	Disparitas Taraf Rendah
Rata-rata	0,277075934	Disparitas Taraf Rendah

Sumber : Data olah, 2021

Analisis Korelasi Pearson

Analisis Korelasi pearson dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi (Indeks Williamson) di Provinsi Maluku Utara. Hasil analisis korelasi pearson dapat dilihat dalam tabel 4 dibawah ini

Tabel 4
Korelasi Pearson Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Williamson

Korelasi	Pertumbuhan Ekonomi	Signifikan
Indeks Williamson	-0,379	0,529

Sumber : Data Olah, 2021

Pembahasan

Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan hasil olahan data daerah yang masuk dalam kategori maju dan cepat berkembang diantaranya : Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. Kota Ternate memang merupakan daerah maju dan cepat tumbuh hal tersebut dikarenakan pusat perekonomian di provinsi Maluku utara hingga kini masih tersentralisasi dikota tersebut dan merupakan salah satu jalur utama penerbangan domestik di Maluku Utara. Begitu pula dengan Kabupaten Halmahera Tengah yang merupakan suatu kabupaten yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Maluku utara, hal tersebut patut dibenarkan karena aktifitas sektor pertambangan dikabupaten ini memberi kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah salah satu perusahaannya ialah PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park yang berlokasi di kecamatan Weda Tengah; Berdasarkan hasil olahan data daerah yang masuk dalam kategori maju dan cepat berkembang diantaranya : Kabupaten Halmahera Timur hal tersebut menunjukkan bahwa kabupaten ini memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata namun memiliki Pendapatan perkapita yang relatif tinggi, dikarenakan kabupaten ini memiliki ketersediaan potensi Sumber Daya Alam pertambangan yang tersebar di beberapa daerah yakni Nikel, Magnesit, Kromit, Talk, batu Gamping dan minyak bumi. Dari potensi tersebut hingga saat ini yang baru tereksplorasi adalah Nikel di sekitaran Pulau Buli dan Pulau Gee. Sedangkan melalui BKPM Provinsi Maluku Utara mencatat sektor unggulan di daerah ini meliputi Sektor Perkebunan, Pertanian, Perikanan Laut, Pertambangan, Air bersih, dan Pariwisata. Selanjutnya untuk sub sektornya unggulan meliputi Kopra, Kakao, Cengkeh, Pala, Tanaman pangan, Ikan cakalang dan Pertambangan.

Berdasarkan hasil olahan data daerah yang masuk dalam kategori cepat berkembang tapi tidak maju diantaranya terdiri dari dua kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Taliabu. Kedua daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi namun dari sisi Pendapatan perkapita masih tergolong rendah. Dengan pesatnya perkembangan sektor pertambangan di Pulau Obi mendorong tingginya laju Produk Domestik Regional Bruto di Halmahera Selatan. Selanjutnya potensi Pertambangan biji besi yang terdapat di Taliabu Utara dan Lede juga mendorong peningkatan PDRB di Kabupaten tersebut. Berdasarkan hasil olahan data daerah yang masuk dalam kategori relatif tertinggal diantaranya : Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat serta Kota Tidore daerah ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita/ (PDRB) perkapita yang rendah dari rata-rata Provinsi Maluku Utara.

Hasil pengklasifikasian Struktur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019 dapat disimpulkan sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini "Diduga struktur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di Provinsi Maluku utara tahun 2015-2019 akan membentuk kuadran berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita, dimana daerah dengan tingkat pertumbuhan dan PDRB Perkapita diatas rata-rata akan masuk dalam kategori daerah maju dan sebaliknya daerah dengan tingkat pertumbuhan dan PDRB Perkapita dibawah rata-rata secara otomatis akan masuk dalam kategori daerah tertinggal". Temuan hasil penelitian menemukan fakta sesuai dengan teori yang dikemukakan

oleh Sjafrizal dimana daerah dengan presentase pertumbuhan ekonomi dan PDRB Perkapita diatas rata-rata di Provinsi Maluku utara berada pada ketegori daerah maju dan cepat berkembang serta sebaliknya daerah dengan persentase pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita dibawah rata-rata Provinsi Maluku utara akan masuk pada klasifikasi daerah relatif tertinggal,

Disparitas Pembangunan Ekonomi Antarwilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara

Ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara dari periode tahun 2015-2019 termasuk dalam kategori disparitas/ketimpangan rendah. Sehingga dapat dikatakan distribusi perekonomian antar wilayah kabupaten/kota semakin merata. Walaupun memiliki kecenderungan nilai indeks yang naik selama periode waktu yang diamati, namun ketimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi tergolong rendah yakni dengan nilai rata-rata sebesar 0,277. Peningkatan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara disebabkan oleh tidak lancarnya proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan oleh aglomerasi sektor perdagangan hanya pada Kota Ternate. Sementara disisi lain aktivitas pertambangan yang berada di beberapa kabupaten diantaranya : Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah juga menjadi pemicu kenaikan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara

Kenyataannya daerah kabupaten/kota yang menyebabkan angka ketimpangan di Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan salah satunya adalah Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Ternate dimana PDRB perkapita di wilayah tersebut berada diatas PDRB perkapita Provinsi Maluku Utara . Kedua wilayah kabupaten tersebut ini memiliki karakteristik kawasan dengan dominasi kegiatan pada sektor pertambangan. Sementara itu, Kota Ternate memiliki karakteristik kawasan dengan dominasi kegiatan pada sektor perdagangan dan jasa. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa seiring berkembangnya aktivitas kawasan di Provinsi Maluku Utara , khususnya pada kawasan aglomerasi dikota Ternate dan pesatnya aktivitas pertambangan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Halmahera Timur, ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota akan meningkat.

Ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara dapat disimpulkan sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini dimana “ Adanya Ketimpangan/ Disparitas Regional antar Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2019 yang disebabkan oleh perbedaan SDA dan Aglomerasi sektor perdagangan diwilayah perkotaan dugaan tersebut berlaku diprovinsi Maluku utara dimana temuan penelitian bahwa beberapa kabupaten yang memiliki potensi sektor pertambangan cenderung lebih cepat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan kabupaten yang masih mengandalkan sektor pertanian dalam menopang perekonomian daerah tersebut. Tak terlepas dari proses Anglomerasi sektor perdagangan diwilayah perkotaan khususnya Kota Ternate menjadi pemicu ketimpangan di Provinsi Maluku Utara hal tersebut dapat sesuai dengan teori dari Sjafrizal(2017) mengemukakan bahwa terjadinya kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada daerah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan ekonomi antar daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat kosentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar, kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Kertimpangan di Provinsi Maluku Utara

Dari hasil analisis diatas diperoleh Korelasi Pearson antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks ketimpangan sebesar -0,379 tanda negatif menunjukkan hubungan yang negatif sedangkan untuk nilai signifikansinya adalah $0,529 > 0,5$ yang artinya hubungan antara pertumbuhan dan Indeks Ketimpangan tidak signifikan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Bahwa perkembangan tingkat Disparitas pembangunan ekonomi yang terjadi diprovinsi Maluku Utara antar wilayah Kabupaten/kota selama periode tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Rata-rata angka Indeks Williamson di Provinsi Maluku Utara periode penelitian adalah sebesar 0,277 dengan kriteria ketimpangan taraf rendah.
2. Pengklasifikasian daerah berdasarkan wilayah kabupaten/kota dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto perkapita di Provinsi Maluku Utara memakai alat analisis Tipologi Klassen periode tahun 2015-2019 dengan pendekatan daerah terbagi menjadi empat klasifikasi daerah. Daerah maju dan tumbuh cepat, yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah; Daerah maju tapi tertekan, yakni Kabupaten Halmahera Timur; Daerah cepat berkembang tapi tidak maju yakni, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Taliabu; Daerah relatif tertinggal yakni, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, dan Kota Tidore.
3. Hasil analisis korelasi Pearson yang dilakukan, untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi (Indeks Williamson) Dari hasil analisis diatas diperoleh Korelasi Pearson antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks ketimpangan sebesar -0,379 tanda negatif menunjukkan hubungan yang negatif sedangkan untuk nilai signifikansinya adalah $0,529 > 0,5$ yang artinya hubungan antara pertumbuhan dan indeks ketimpangan tidak signifikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai masukan yaitu : Pemerintah daerah dianjurkan untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah untuk masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dengan melihat kondisi ketertinggalan daerah dari Infrastruktur fisik, Penciptaan lapangan kerja serta program-program dalam meningkatkan Kualitas SDM masing-masing kabupaten kota melalui SKPD terkait masing-masing kabupaten/kota. Disamping itu rekomendasi kebijakan untuk pemerintah daerah perlu untuk membangun sarana penghubung saran transportasi yang menghubungkan seluruh wilayah di Provinsi Maluku Utara serta fasilitas telekomunikasi. Jika rekomendasi tersebut dapat dilakukan maka ketimpangan ekonomi antardaerah akan bisa dikuarangi karena usaha perdagangan serta mobilitas faktor-faktor produksi secara otomatis akan lancar. Dengan cara yang seperti itu daerah yang yang belum maju akan dapat pula meningkatkan kegiatan perdagangan dan investasi didaerah tersebut, dengan demikian secara otomatis aktivitas produksi dan penyediaan lapangan kerja akan dapat pula diakalkan oleh pemerintah daerah untuk dapat ditingkatkan.

Pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara juga perlu merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah berdasarkan klasifikasi tipologi daerah antara lain: untuk klasifikasi daerah maju, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya lebih mengarah ke sektor dan kegiatan ekonomi dan sosial yang menggunakan teknologi moderen dan padat modal seperti sektor industri dan jasa. Untuk klasifikasi daerah maju tapi tertekan, perumusan kebijakan daerah dan program pembangunan daerah lebih diarahkan pada proses pemecahan masalah yang menyebabkan daerah tersebut tertekan, semisalnya penurunan harga komoditas unggulan daerah tersebut dipasaran global. Untuk klasifikasi daerah cepat bekembang, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya lebih diarahkan pada upaya untuk mendorong proses pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah tersebut dan Untuk klasifikasi daerah relatif tertinggal, perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah sebaiknya perlu diarahkan pada upaya untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja melalui pemanfaatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta:UPP STIM YKPN.
- Aswandi, H dan Kuncoro, Mudrajad. (2002). *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.17, No.1.
- Dumairy. (2000). *Perekonomian Indonesia. Cetakan kelima*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Jhingnan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press
- Nazir, Moh. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah, cetakan pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekaran, Uma. (2010). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Karya Salemba Empat
- Sukirno, Sadono. (2016). *Makroekonomi, Teori Pengantar, Edisi ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (1997). *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Yogyakarta: LP3ES
- Sjafrizal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Pers
- Sjafrizal. (2018). *Analisis Ekonomi Regional dan Penerapannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suparmoko, Irawan. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE
- Tambunan, Tulus. 2001. *Industrialisasi Negara Berkembang*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2008). *Pembangunan Ekonomi. Edisi kesembilan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.